CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

b. Menyediaakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

b. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

c. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

o. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Tanggal 25 Oktober 2019 Nomor : 903/00024475 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan

Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

Lampiran

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh pada rentang 5,2%-5,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang sebesar 5,27%. Perekonomian domestik diperkirakan membaik sehingga mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga. Perbaikan ekonomi global, terutama mitra dagang utama Jawa Tengah diperkirakan meningkatkan kegiatan usaha. Selanjutnya, komitmen pemerintah yang tinggi dalam meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur diperkirakan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi pada 2019. Daya beli masyarakat yang relatif terjaga juga berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat pada bulan Desember 2019 di Jawa Tengah terjadi inflasi sebesar 0,45 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 136,71. Penyebab utama inflasi Jawa Tengah Desember 2019 adalah naiknya harga telur ayam ras, daging ayam ras, angkutan udara, beras dan bawang merah. Penahan laju inflasi adalah turunnya harga salak, cabai merah, bawang putih, minyak goreng dan bandeng/bolu.

Pada bulan September 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Jawa Tengah mencapai 3,68 juta orang (10,58 persen), berkurang sebanyak 63,83 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019 yang berjumlah 3,74 juta orang (10,80 persen). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Jenis pengeluaran komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan antara lain beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, dan gula pasir. Sementara itu, untuk komoditi

bukan makanan yang besar pengaruhnya mencakup perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengupayakan berbagai program maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui strategi pengurangan beban masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin termasuk mensinergikan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Jawa Tengah adalah dengan menggratiskan biaya pendidikan di SMK Jawa Tengah termasuk menggratiskan buku, seragam, praktikum serta diasramakan dengan pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. Langkah Pemerintah Jawa Tengah memakai jalur pendidikan itu diilhami dari keberhasilan SMK Jawa Tengah mencetak tenaga kerja terampil, sehingga mendapatkan gaji tinggi di perusahaan besar, sehingga nantinya dapat meningkatkan taraf hidup.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2019 Neraca perdagangan Jawa Tengah mengalami defisit defisit US$ 209,18 juta. Neraca perdagangan migas mengalami defisit US$ 193,78 juta. Neraca perdagangan nonmigas Agustus 2019 defisit US$ 15,40 juta. Nilai ekspor Jawa Tengah Agustus 2019 sebesar US$ 756,15 juta atau turun 21,27 persen dibanding ekspor Juli 2019. Namun jika dibandingkan Agustus 2018 naik 3,21 persen. Nilai impor Jawa Tengah Agustus 2019 sebesar US$ 965,33 juta atau turun 12,02 persen dibanding Juli 2019. Begitu pula jika dibandingkan Agustus 2018 turun sebesar 37,68 persen.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari proses dan mekanisme pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah guna menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada implementasinya, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah terbagi dalam kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada upaya memaksimalkan potensi penerimaan daerah dalam upaya penguatan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
2. Optimalisasi pemanfaatan/pemberdayaan dan pengelolaan aset daerah;
3. Peningkatan dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak;
4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
5. Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta.

Implementasi dari kebijakan pendapatan dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain; inventarisasi potensi riil sumber-sumber pendapatan serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada pendapatan asli daerah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2019 difokuskan pada perwujudan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah serta berkontribusi terhadap capaian RPJMD.

Belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan/situasi/kondisi, berorientasi pada capaian hasil dengan memperhatikan akuntabilitas perencanaan serta efektifitas, efisiensi pengunaan anggaran dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disusun dengan pendekatan anggaran

berbasis kinerja. Kebijakan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang diarahkan untuk :

1. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
2. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;
3. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan;
4. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah;
5. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional;
6. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah Kabupaten/Kota melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang meliputi:

a. Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk:

1) Belanja Pegawai, antara lain :
   - Gaji dan Tunjangan Pegawai;
   - Tambahan Penghasilan Pegawai.
2) Belanja Hibah;
3) Belanja Bantuan Sosial;
4) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada Tahun Anggaran 2019 diutamakan untuk memenuhi /komitmen dalam rangka penanganan program strategis dan prioritas sesuai hasil Musrenbang;
6) Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah serta tidak

biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan Program dan Kegiatan, dengan kebijakan diarahkan untuk :

1) Belanja Pegawai antara lain untuk honorarium PNS, honorarium non PNS, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS;
2) Belanja Barang dan Jasa antara lain untuk barang pakai habis, bahan material, belanja barang untuk dihibahkan, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa kendaraan bermotor, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas;
3) Belanja Modal antara lain untuk pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, kontruksi jalan, konstruksi jembatan, konstruksi jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, konstruksi/pembelian bangunan, buku/kepustakaan, barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pada hakikatnya pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri

atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pada BUMD.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2019, diarahkan untuk :

a. Penggunaan SiLPA tahun 2018 sebagai sumber penerimaan APBD Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian.
c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
d. Membentuk dana cadangan.

2.2.4 Kebijakan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang keuangan. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Adapun rincian kebijakan keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada upaya pencapaian target pendapatan yang ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2019. Pendapatan daerah bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan,

ruangan, tempat penginapan/villa dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu berupa hasil penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai, penjualan kendaraan dinas roda dua/empat dan penjualan bahan-bahan bekas bangunan.

Dalam APBD Perubahan TA 2019, target pendapatan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp 70.035.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.521.296.043,00 atau 121,12% dari anggaran yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja. Kebijakan belanja daerah terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Total anggaran belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2019 sebesar Rp 78.813.461.000,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 21.544.031.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 57.269.430.000,00. Hingga akhir TA 2019, belanja tidak langsung telah terealisasi sebesar Rp 21.180.925.375,00 atau 98,31 % dari anggarannya, sedangkan belanja langsung terealisasi sebesar Rp 50.296.754.810,00 atau 87,82 % dari anggaran yang telah ditetapkan.

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Realisasi pencapaian keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah. Realisasi pendapatan bersumber dari hasil retribusi jasa usaha dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya. Realisasi belanja daerah terbagi menjadi realisasi belanja tidak langsung dan realisasi belanja langsung. Realisasi belanja tidak langsung bersumber dari pembayaran gaji pegawai negeri sipil beserta tunjangannya dan tambahan penghasilan. Realisasi belanja langsung bersumber dari realisasi penyerapan dana program/kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2019.

3.1.1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah TA. 2019 sejumlah Rp 7.035.650.000,00 terealisasi sejumlah Rp 8.521.296.043,00,00 atau 121,12% dari target.

Realisasi pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi hasil retribusi jasa usaha sebesar Rp 7.399.930.608,00 (86,84% dari total pendapatan daerah); lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 1.121.365.435,00 (13,16% dari total pendapatan daerah). Retribusi Jasa usaha terdiri dari retribusi penyewaan tanah & bangunan, penyewaan ruangan, retribusi tempat penginapan/villa dan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Sedangkan lain-lain PAD yang sah berasal dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan antara lain penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai, penjualan kendaraan dinas roda empat dan penjualan bahan-bahan bekas bangunan. Proporsi sumber pendapatan terlihat pada diagram 3.1 dan tabel 3.2 dibawah ini.

DIAGRAM 3.1
PROPORSI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

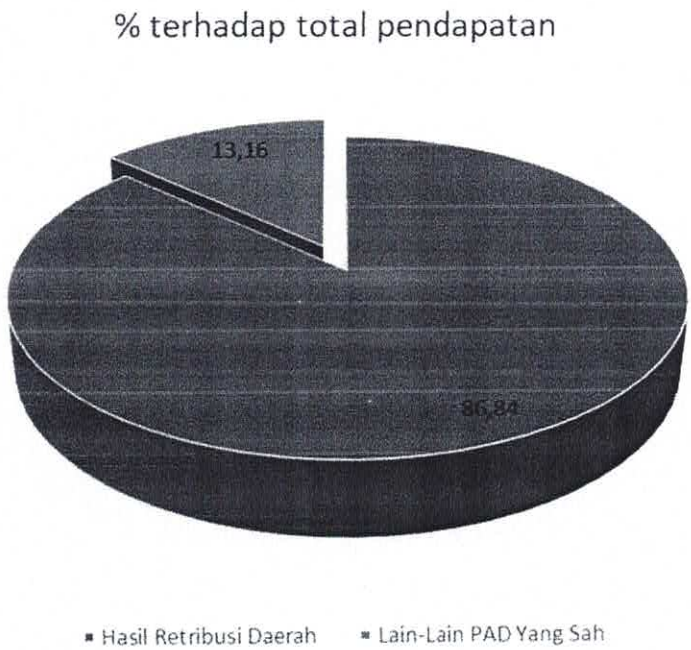

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019

TABEL 3.2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	**PENDAPATAN**	**7.035.650.000,00**	**8.521.296.043,00**	**121,12**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**7.035.650.000,00**	**8.521.296.043,00**	**121,12**
4.1.2	Hasil Retribusi Dacrah	6.504.150.000,00	7.399.930.608,00	113,77
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	6.504.150.000,00	7.399.930.608,00	113,77
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.000.000.000,00	1.058.230.538,00	105,82
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	819.150.000,00	950.648.000,00	116,05
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	4.550.000.000,00	4.614.239.120,00	101,41
4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	135.000.000,00	776.812.950,00	575,42

4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	531.500.000,00	1.121.365.435,00	210,98
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	531.500.000,00	1.121.365.435,00	210,98
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	140.000.000,00	489.414.143,00	349,58
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	63.500.000,00	-	-
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	202.000.000,00	119.431.468,00	59,12
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	126.000.000,00	512.519.824,00	406,76

3.1.2. Belanja Daerah

Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.3 di bawah ini, target anggaran Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 78.813.461.000,00 realisasinya sebesar Rp 71.477.680.185,00 atau mencapai 90,69% dari total anggaran belanja. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp 66.242.174.485,00 atau 92,68% dari total belanja daerah, sedangkan Belanja Modal sebesar Rp 5.235.505.700,00 atau 7,32% dari total belanja daerah.

TABEL 3.3

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	**BELANJA**	**78.813.461.000,00**	**71.477.680.185,00**	**90,69**
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**21.544.031.000,00**	**21.180.925.375,00**	**98,31**
5.1.1	Belanja Pegawai	21.544.031.000,00	21.180.925.375,00	98,31
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.668.844.000,00	9.343.561.356,00	96,64
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.648.729.000,00	7.447.522.100,00	97,37
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	667.005.000,00	649.856.352,00	97,43
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	238.662.000,00	236.500.000,00	99,09

5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	66.474.000,00	52.315.000,00	78,70
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	329.724.000,00	320.115.000,00	97,09
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	353.164.000,00	342.691.440,00	97,03
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	37.717.000,00	25.339.315,00	67,18
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	113.000,00	111.656,00	98,81
5.1.1.01.22	Iuran BPJS Kesehatan	264.221.000,00	207.924.314,00	78,69
5.1.1.01.26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	15.759.000,00	15.296.553,00	97,07
5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian	47.276.000,00	45.889.626,00	97,07
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.875.187.000,00	11.837.364.019,00	99,68
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	11.875.187.000,00	11.837.364.019,00	99,68
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**57.269.430.000,00**	**50.296.754.810,00**	**87,82**
5.2.1	Belanja Pegawai	12.171.250.000,00	11.459.550.000,00	94,15
5.2.1.01	Honorarium PNS	10.248.150.000,00	9.663.900.000,00	94,30
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.666.450.000,00	8.399.700.000,00	96,92
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	98.200.000,00	73.000.000,00	74,34
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	1.483.500.000,00	1.191.200.000,00	80,30
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.923.100.000,00	1.795.650.000,00	93,37
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.255.200.000,00	1.185.850.000,00	94,47
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	361.500.000,00	359.000.000,00	99,31
5.2.1.02.06	Upah Tenaga Kerja	36.000.000,00	24.500.000,00	68,06
5.2.1.02.10	Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis	260.400.000,00	216.300.000,00	83,06
5.2.1.02.14	Upah Pekerja Seni	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.005.674.000,00	33.601.699.110,00	86,15
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.795.522.000,00	3.646.199.360,00	96,07
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.682.471.000,00	1.659.577.000,00	98,64
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	297.668.000,00	296.931.000,00	99,75
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	51.360.000,00	50.430.000,00	98,19
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	230.337.000,00	222.495.400,00	96,60
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	396.000.000,00	393.585.000,00	99,39
5.2.2.01.10	Belanja Panitya	361.356.000,00	311.736.960,00	86,27
5.2.2.01.16	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	12.830.000,00	12.220.000,00	95,25

5.2.2.01.19	Belanja Souvenir/Cendera Mata	58.400.000,00	8.275.000,00	14,17
5.2.2.01.20	Belanja Perlengkapan Jalan	343.100.000,00	339.129.000,00	98,84
5.2.2.01.21	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	362.000.000,00	351.820.000,00	97,19
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	130.000.000,00	78.358.100,00	60,28
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	130.000.000,00	78.358.100,00	60,28
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.190.881.000,00	4.683.301.455,00	75,65
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	110.000.000,00	11.139.783,00	10,13
5.2.2.03.02	Belanja Air	50.000.000,00	17.680.334,00	35,36
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.602.000.000,00	878.122.398,00	54,81
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	87.500.000,00	35.000.000,00	40,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	76.668.000,00	49.020.000,00	63,94
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	5.220.000,00	293.500,00	5,62
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	850.500.000,00	719.761.280,00	84,63
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	4.050.000,00	0,00	-
5.2.2.03.13	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	62.955.000,00	0,00	-
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	285.500.000,00	281.198.000,00	98,49
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	12.063.000,00	9.685.000,00	80,29
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	956.025.000,00	870.025.000,00	91,00
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengawalan	85.000.000,00	18.500.000,00	21,76
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Keamanan	633.200.000,00	593.636.100,00	93,75
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Langganan TV Berbayar	40.000.000,00	33.874.960,00	84,69
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Kebersihan	1.330.200.000,00	1.165.365.100,00	87,61
5.2.2.03.34	Belanja Jasa Pendidikan Non Formal	0,00	0,00	-
5.2.2.03.35	Belanja Perkara Hukum	0,00	0,00	-
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	537.392.000,00	316.578.601,00	58,91
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	491.222.000,00	277.397.601,00	56,47
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	46.170.000,00	39.181.000,00	84,86
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	390.000.000,00	336.987.404,00	86,41
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	280.001.000,00	248.230.954,00	88,65
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	49.999.000,00	49.700.000,00	99,40
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	5.546.700,00	22,19

5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	35.000.000,00	33.509.750,00	95,74
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.371.652.000,00	3.039.307.550,00	90,14
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.985.762.000,00	2.751.080.100,00	92,14
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.890.000,00	288.227.450,00	74,69
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.816.220.000,00	2.670.700.000,00	94,83
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	77.760.000,00	77.760.000,00	100,00
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	39.000.000,00	5.000.000,00	12,82
5.2.2.07.07	Belanja Sewa Hotel	2.699.460.000,00	2.587.940.000,00	95,87
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	0,00	-
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	0,00	-
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	346.920.000,00	231.530.500,00	66,74
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	62.320.000,00	45.225.000,00	72,57
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	19.500.000,00	5.100.000,00	26,15
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	235.800.000,00	151.950.000,00	64,44
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Tanaman	24.300.000,00	24.255.500,00	99,82
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.379.400.000,00	1.835.435.086,00	77,14
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.052.675.000,00	1.683.992.170,00	82,04
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	314.700.000,00	140.132.916,00	44,53
5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	12.025.000,00	11.310.000,00	94,05
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	174.200.000,00	159.600.000,00	91,62
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	174.200.000,00	159.600.000,00	91,62
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.020.286.000,00	9.653.724.171,00	87,60
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.151.795.000,00	6.572.513.437,00	91,90
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.868.491.000,00	3.081.210.734,00	79,65
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	322.900.000,00	238.970.000,00	74,01
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	322.900.000,00	238.970.000,00	74,01
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.767.301.000,00	5.048.006.883,00	87,53
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	1.312.475.000,00	894.567.300,00	68,16
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	3.910.826.000,00	3.840.241.226,00	98,20
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Jaringan	544.000.000,00	313.198.357,00	57,57

5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.733.000.000,00	1.663.000.000,00	95,96
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	800.000.000,00	737.434.000,00	92,18
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi	933.000.000,00	925.566.000,00	99,20
5.2.2.32	Belanja Pengadaan Jasa Lainnya	0,00	0,00	-
5.2.2.32.01	Belanja Jasa Agen Perjalanan	0,00	0,00	-
5.2.3	Belanja Modal	6.092.506.000,00	5.235.505.700,00	85,93
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	200.000.000,00	197.000.000,00	98,50
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	200.000.000,00	197.000.000,00	98,50
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.318.866.000,00	1.501.488.700,00	64,75
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	232.300.000,00	207.130.000,00	89,16
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	797.000.000,00	416.272.200,00	52,23
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.289.566.000,00	878.086.500,00	68,09
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.468.540.000,00	2.446.781.000,00	99,12
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2.468.540.000,00	2.446.781.000,00	99,12
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	138.600.000,00	135.740.000,00	97,94
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	138.600.000,00	135.740.000,00	97,94
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	-
5.2.3.35.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00	-
5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	966.500.000,00	954.496.000,00	98,76
5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	966.500.000,00	954.496.000,00	98,76
	Jumlah	**78.813.461.000,00**	**71.477.680.185,00**	**90,69**

Proporsi Belanja Operasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 66.242.174.485,00 atau sebesar 92,68% dari total belanja daerah, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 32.640.475.375,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 33.601.699.110,00.

Belanja Modal sebesar Rp 5.235.505.700,00 atau 7,32% dari total belanja daerah. Proporsi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal seperti ditunjukkan dalam diagram 3.4 dan 3.5 sebagai berikut :

DIAGRAM 3.4
PROPORSI BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

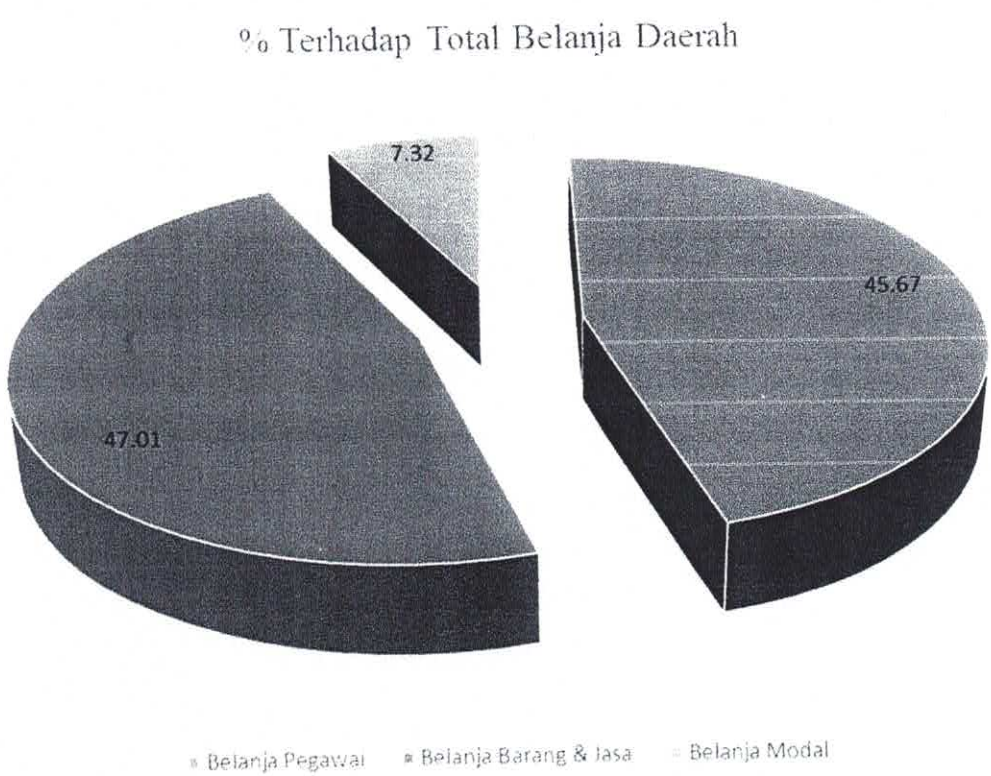

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019

Komponen Belanja Modal Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 5.235.505.700,00 atau sebesar 7,32% dari total belanja daerah yang terdiri dari belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp 4.281.009.700,00 dan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 954.496.000,00. Proporsi Belanja Modal dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

DIAGRAM 3.5
PROPORSI BELANJA MODAL
TAHUN ANGGARAN 2019

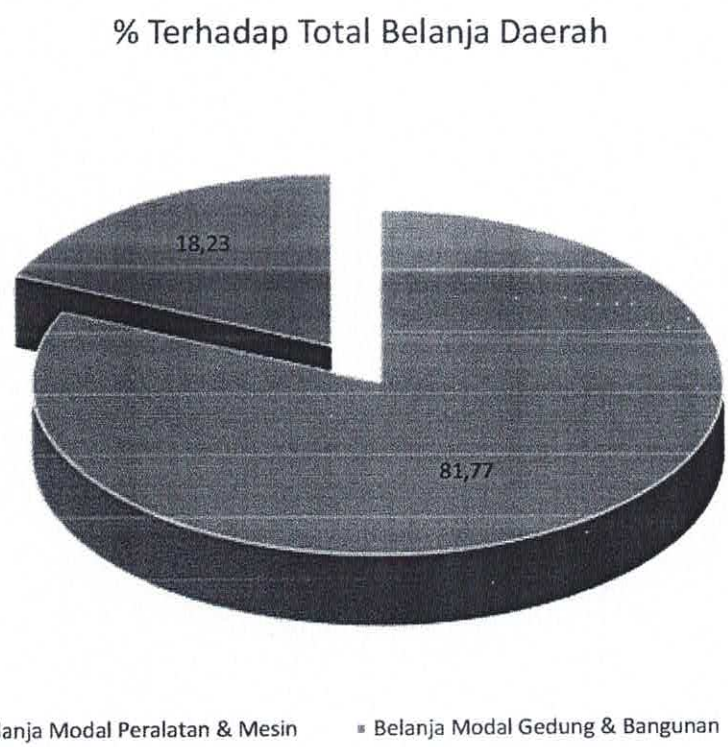

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah, yakni sebagai berikut :

1. Kegiatan penyediaan makan minum rapat perangkat daerah hanya terserap sebesar 38,08% karena adanya penghematan belanja makan minum.
2. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah terserap sebesar 66,94% dikarenakan adanya pemindahan kantor BPKAD Prov. Jateng ke tempat yang baru, sehingga belanja pemeliharaan tidak dapat direalisasikan secara maksimal.

BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah PPTK yang berada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan

realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca (basis cash forward to accrual).

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dan rekening kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1. Kas Di Kas daerah

Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah

4.3.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dalam rangka pelaksanaan penerimaan di SKPD berwenang sesuai peraturan perundang – undangan yang berada di brankas atau di rekening bendahara penerimaan. Termasuk kas di bendahara penerimaan adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi *financial technology.*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari transfer penerimaan pendapatan ke RKUD.

4.3.3. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggung-jawabkan dalam rangka pelaksanaan

pengeluaran SKPD yang berada di brankas atau di rekening bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang termasuk didalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan.

4.3.4. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

4.3.5. Piutang

a. Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

b. Jenis piutang antara lain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, Piutang Lainnya.

c. Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.

d. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antata pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah diakui sebesar

nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

e. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

4.3.6. Persediaan

a. Barang Persediaan dapat terdiri dari barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor,suku cadang; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi,barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan seperti hewan, tanaman, tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.

b. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

c. Pengukuran persediaan dilakukan dengan metode biaya perolehan, harga pokok produksi dan nilai wajar.

d. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

e. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan harga pembelian terakhir berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir tahun dan khusus untuk pencatatan persediaan secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediannya dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

f. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan stock opname

(inventarisasi fisik) persediaan yang dilakukan secara periodik. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

4.3.7. Aset Tetap

a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
   - Berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
   - Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
   - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
   - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

c. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsi dalam aktivitas operasi entitas, yang terdiri atas tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

d. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

e. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

f. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset

pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

g. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

h. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang lebih dari Rp 500.000 Pengeluaran untuk per satuan gedung dan bangunan adalah yang lebih dari Rp 20.000.000 dan Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

i. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset *ekstrakomtable* dan berlaku sejak ditetapkan.

j. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

k. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

l. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan *(carrying amount)*.

m. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran *(expenses)* pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

n. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/ konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.Biaya perolehan aset pertukaran diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

o. Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

p. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

q. Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

r. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

s. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

4.3.8. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

4.3.9. Peralatan Dan Mesin

Mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10. Gedung Dan Bangunan

Seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Gedung adalah suatu bangunan yang mempunyai dimensi ruang sedangkan bangunan tidak memiliki dimensi ruang. Gedung dan Bangunan dibedakan menjadi :

a. Gedung dan Bangunan Permanen merupakan bangunan dengan konstruksi beton;

b. Gedung dan Bangunan Semi Permanen merupakan bangunan dengan fondasi, dinding dan tiang yang kuat tetapi mudah dihancurkan mesin besar.

c. Gedung dan Bangunan Darurat merupakan bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.

4.3.11. Jalan, Irigasi Dan jaringan

a. Jalan, irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. jalan, irigasi instalasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

b. Instalasi adalah rangkaian alat yang mempunyai nilai konstruksi besar digunakan untuk tujuan tertentu, sedangkan Jaringan adalah rangkaian alat yang mempunyai nilai konstruksi besar untuk mendistribusikan suatu proses. Jalan, irigasi dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :
   - Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
   - Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
   - Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
   - Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

c. Aset infrastruktur meliputi antara lain jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan.

d. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

4.3.12. Aset Tetap Lainnya

Mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku

dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman.

4.3.13. Konstruksi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan hasil dari kontrak konstruksi yaitu perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

4.3.14. Aset Lainnya

a. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.
b. Jenis-jenis aset tak berwujud adalah *Goodwill,* hak paten dan hak cipta, royalty, software, lisensi dan *franchise*, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tidak berwujud lainnya dan aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
c. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
e. Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset tak berwujud tersebut.
f. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer dianggap sebagai beban pemeliharaan apabila sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

g. Amortisasi dibagi menjadi amortisasi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

h. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

4.3.15. Kewajiban Jangka Pendek & Jangka Panjang

a. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber pemerintah daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

c. Kewajiban kontijensi diakui saat peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah

ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia.

d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mengikuti karakteristik dari masing-masing pos kewajiban dengan penjelasan sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek

- Utang Pihak Ketiga

  Pada saat pemerintah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian.

- Utang bunga

  Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. SKPD tidak melakukan pencatatan utang bunga karena merupakan transaksi PPKD.

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga

  Nilai Pungutan/Potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain (Kas Negara cq Pendapatan Pajak, PT Taspen, Taperum dan BPJS Kesehatan) harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

  Nilai yang dicantumkan di laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Pendapatan Diterima Dimuka

  Nilai yang dicantumkan pada laporan keuangan adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

- Utang Belanja

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.

- Utang transfer

  Utang transfer DBH dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar bagian pendapatan entitaspenerima yang belum dibayarkan sampai dengan periode pelaporan. Sedangkan utang selain DBH dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang seharusnya menjadi hak entitas penerima dikurangi dengan jumlah yang telah disalurkan.

Kewajiban Jangka Panjang-Utang Dalam Negeri

- Merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman dari lembaga perbankan atau non perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- Utang non perbankan sumber pinjaman antara lain obligasi merupakan salah satu jenis Surat Utang Negara dengan imbalan bunga tetap atau imbalan bunga secara variabel. Obligasi dapat ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum atau diperdagangkan di pasar modal

e. Kewajiban kontijensi diakui saat peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar *(probable)*. Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasikan secara andal

4.3.16. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

a. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

b. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
   - Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
   - Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.

c. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca.

d. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD.

e. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.

f. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.17. Koreksi Kesalahan

a. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.

b. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   1. Kesalahan tidak berulang
      a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
         Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.
      b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

1) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
2) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban)
   a. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
      - Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
      - Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

   b. Belanja dan Beban
      - Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;
      - Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas

dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

c. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

d. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

e. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,

f. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

2. Kesalahan berulang dan sistematis

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan

kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.3.18. Pendapatan

Pendapatan – LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila Realisasi pendapatan LO dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi

Pendapatan - LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa

dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

d. Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

4.3.19. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

c. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.

d. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.

e. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

4.3.20. Pembiayaan

a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

b. Akuntansi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c. Pembiayaan Neto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

d. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

(Dalam Rupiah)

5.1.1 Pendapatan LRA — Rp 8.521.296.043,00

Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil retribusi jasa usaha dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan rincian sebagai berikut :

No	Pendapatan Daerah	Tahun 2019		%	Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	7.035.650.000,00	8.521.296.043,00	121,12	8.825.919.409,00
2	Pendapatan Transfer - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**7.035.650.000,00**	**8.521.296.043,00**	**121,12**	**8.825.919.409,00**

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 8.521.296.043,00 atau 121,12% dari anggarannya sebesar Rp 7.035.650.000,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 8.825.919.409,00.

(Dalam Rupiah)

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA — Rp 8.521.296.043,00

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2019 dan 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Pendapatan Asli Daerah - LRA	Tahun 2019		%	Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	6.504.150.000,00	7.399.930.608,00	113,77	7.005.356.931,00
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	531.500.000,00	1.121.365.435,00	210,98	1.820.562.478,00
	Jumlah	**7.035.650.000,00**	**8.521.296.043,00**	**121,12**	**8.825.919.409,00**

Realisasi PAD-LRA TA. 2019 sebesar Rp 8.521.296.043,00. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Rp 7.399.930.608,00 dan Lain-Lain PAD yang Sah Rp 1.121.365.435,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 realisasi PAD berasal dari pendapatan retribusi sebesar Rp 7.005.356.931,00 dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp 1.820.562.478,00. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah- LRA — Rp 7.399.930.608,00

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemungutan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mencapai 113,84 % dari target yang telah ditetapkan dengan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

No	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Tahun 2019		%	Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Retribusi Sewa Tanah & Bangunan	1.000.000.000,00	1.058.230.538,00	105,82	358.338.565,00
2	Retribusi Sewa Ruangan Asrama Haji Donohudan	819.150.000,00	950.648.000,00	116,05	845.599.650,00
3	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Asrama Haji Donohudan	4.550.000.000,00	4.614.239.120,00	101,41	4.820.912.320,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	135.000.000,00	776.812.950,00	575,42	980.506.396,00
	Jumlah	**6.504.150.000,00**	**7.399.930.608,00**	**113,77**	**7.005.356.931,00**

1) Sewa Tanah & Bangunan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.058.230.538,00 merupakan sewa tanah dan bangunan di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang dan sewa lahan halaman rumah dinas eks Bakorwil III.

2) Retribusi Sewa Ruangan Asrama Haji Donohudan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 950.648.000,00 dari anggaran Rp 819.150.000,00. Realisasi ini meningkat sebesar 12,42 % jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2018 yang sebesar Rp 845.599.650,00.

3) Retribusi Penginapan/pesanggrahan/Villa Asrama Haji Donohudan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 4.614.239.120,00 dari anggaran Rp 4.550.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar 4.820.912.320,00 realisasi di Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar 4,29 % penurunan ini disebabkan karena adanya perbaikan gedung Madinah dan Mekah sehingga tidak dapat disewakan untuk umum.

4) Retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 776.812.950,00 diantaranya merupakan pemanfaatan tanah dan bangunan di wilayah Banyumas, sewa gedung Graha Bhakti Praja dan sewa rumah jabatan Purwokerto. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan

sebesar Rp 200.293.446,00 atau sebesar 20,77%. Penurunan ini diantaranya disebabkan karena adanya perbaikan gedung Graha Bhakti Praja sehingga tidak dapat disewakan.

(Dalam Rupiah)

5.1.1.1.2 Lain-Lain PAD Yang Sah — Rp 1.121.365.435,00

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap. Realisasi dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 1.121.365.435,00 atau 210,98% dari target yang telah dianggarkan. Rincian realisasi Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Tahun 2019		%	Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	531.500.000,00	1.121.365.435,00	210,98	1.820.522.178,00
2	Penerimaan Jasa Giro	-	-	-	-
3	Penerimaan Bunga Deposito	-	-		-
4	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	0,00	-	40.300,00
	Jumlah	**531.500.000,00**	**1.121.365.435,00**	**210,98**	**1.820.562.478,00**

1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan – LRA

Merupakan hasil penjualan peralatan/perlengkapan/inventaris kantor yang tidak terpakai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 405.717.643,00 hasil penjualan kendaraan dinas roda empat sebesar Rp 119.431.468,00 dan penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebesar Rp 596.216.324,00.

2) Penerimaan Jasa Giro & Bunga Deposito – LRA

Merupakan hasil jasa Giro dan bunga deposito Kas Daerah yang ditempatkan pada Bank pada Tahun Anggaran 2019 dan dicatat sebagai penerimaan PPKD.

3) Pendapatan dari Pengembalian - LRA

Pada Tahun Anggaran 2019 tidak ada pendapatan dari pengembalian, tetapi pada Tahun Anggaran 2018 terdapat realisasi sebesar Rp 40.300,00 yang merupakan pendapatan dari pengembalian penggandaan dokumen lelang Tahun Anggaran 2018.

(Dalam Rupiah)

5.1.2 Belanja Daerah — Rp 71.477.680.185,00

Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No	Belanja Daerah	Tahun 2019		%	Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Operasi	72.720.955.000,00	66.242.174.485,00	91,09	61.109.504.829,00
2	Belanja Modal	6.092.506.000,00	5.235.505.700,00	85,93	6.877.039.600,00
	Jumlah	**78.813.461.000,00**	**71.477.680.185,00**	**90,69**	**67.986.544.429,00**

Rincian realisasi Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

5.1.2.1 Belanja Operasi — Rp 66.242.174.485,00

Belanja Operasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah TA.2019 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	Tahun 2019		%	Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Pegawai	33.715.281.000,00	32.640.475.375,00	96,81	34.248.419.713,00
2	Belanja Barang dan Jasa	39.005.674.000,00	33.601.699.110,00	86,15	26.861.085.116,00
	Jumlah	**72.720.955.000,00**	**66.242.174.485,00**	**91,09**	**61.109.504.829,00**

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 66.242.174.485,00 atau mencapai 91,09% dari anggaran. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 32.640.475.375,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 33.601.699.110,00. Sedangkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 34.248.419.713,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 26.861.085.116,00. Adapun rincian belanja operasi Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai — Rp 32.640.475.375,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 32.640.475.375,00 atau mencapai 96,81% dari anggaran. Belanja Gaji & Tunjangan sebesar Rp 9.343.561.356,00, Tambahan Pengasilan PNS sebesar Rp 11.837.364.019,00, Honorarium PNS sebesar Rp 9.663.900.000,00 dan Honorarium Non PNS sebesar Rp 1.795.650.000,00. Sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 34.248.419.713,00.

(Dalam Rupiah)

5.1.3 Belanja Modal — Rp 5.235.505.700,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	Belanja Modal	Tahun 2019		%	Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.126.006.000,00	4.281.009.700,00	83,52	4.649.610.600,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	966.500.000,00	954.496.000,00	98,76	2.218.351.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00	9.078.000,00
	Jumlah	**6.092.506.000,00**	**5.235.505.700,00**	**85,93**	**6.877.039.600,00**

(Dalam Rupiah)

5.1.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin — Rp 4.281.009.700,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 merupakan pengadaan Alat angkutan darat bermotor sebesar Rp 197.000.000,00, pengadaan alat rumah tangga sebesar Rp 1.501.488.700,00, pengadaan komputer sebesar Rp 2.446.781.000,00 dan pengadaan alat studio sebesar Rp 135.740.000,00. Sedangkan total realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 4.649.610.000,00.

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2019		%	Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	-	-	0,00	1.787.807.000,00
2	Pengadaan Alat-alat Bantu	-	-	0,00	45.100.000,00
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	200.000.000,00	197.000.000,00	98,50	49.900.000,00
4	Pengadaan Alat Kantor	-	-	0,00	71.378.000,00
5	Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.318.866.000,00	1.501.488.700,00	64,75	1.273.999.600,00
6	Pengadaan Komputer	2.468.540.000,00	2.446.781.000,00	99,12	826.154.500,00
7	Pengadaan Alat Studio	138.600.000,00	135.740.000,00	97,94	595.271.500,00
	Jumlah	**5.126.006.000,00**	**4.281.009.700,00**	**83,52**	**4.649.610.600,00**

(Dalam Rupiah)

5.1.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan — Rp 954.496.000,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 berupa pengadaan bangunan tugu titik kontrol/pasti berupa pembangunan pagar bumi di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Rembang dengan

total realisasi sebesar Rp 954.496.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.199.979.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 245.483.000,00 atau sebesar 20,46%.

No	Belanja Modal Gedung & Bangunan	Tahun 2019		%	Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	0,00	1.018.372.000,00
2	Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	966.500.000,00	954.496.000,00	98,76	1.199.979.000,00
	Jumlah	**966.500.000,00**	**954.496.000,00**	**98,76**	**2.218.351.000,00**

(Dalam Rupiah)

5.1.3.3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **Rp 0,00**

Pada Tahun Anggaran 2019 tidak ada realisasi belanja modal aset tetap lainnya sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 terdapat pengadaan buku ilmu pengetahuan sebesar Rp 9.078.000,00.

No	Belanja Modal Aset Lainnya	Tahun 2019		%	Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan	-	-	-	9.078.000,00
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**9.078.000,00**

5.1.4 Surplus/Defisit

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah APBD yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019. APBD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah defisit sebesar Rp 62.956.384.142,00.

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah pendapatan Badan Penngelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Retribusi, Lain-lain PAD Yang Sah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Saldo Pendapatan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.525.421.043,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 Rp 8.825.919.409,00 dengan rincian:

No	Pendapatan Daerah - LO	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2019	Tahun 2018
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	8.521.296.043,00	8.825.919.409,00
2	Pendapatan Transfer - LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	0,00	0,00
	Jumlah	**8.521.296.043,00**	**8.825.919.409,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2019 sebesar Rp 7.404.055.608,00 atau sebesar 86.84% dari total pendapatan-LO. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 1.121.365.435,00 atau sebesar 13,16% dari total pendapatan-LO. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Pendapatan Asli Daerah - LO	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2019	Tahun 2018
1	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.399.930.608,00	7.005.356.931,00
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	1.121.365.435,00	1.820.562.478,00
	Jumlah	**8.521.296.043,00**	**8.825.919.409,00**

No	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2019	Tahun 2018
1	Retribusi Sewa Tanah & Bangunan	1.058.230.538,00	358.338.565,00
2	Retribusi Sewa Ruangan Asrama Haji Donohudan	950.648.000,00	845.599.650,00
3	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Asrama Haji Donohudan	4.614.239.120,00	4.820.912.320,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	776.812.950,00	980.506.396,00
	Jumlah	**7.399.930.608,00**	**7.005.356.931,00**

No	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2019	Tahun 2018
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.121.365.435,00	1.820.522.178,00
2	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	40.300,00
	Jumlah	**1.121.365.435,00**	**1.820.562.478,00**

5.2.2 Beban

Beban merupakan belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Adapun rincian beban pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	Beban - LO	Tahun 2019	Tahun 2018
		Rp	Rp
1	Beban Pegawai	32.640.475.375,00	34.248.419.713,00
2	Beban Persediaan	3.866.199.960,00	5.067.027.275,00
3	Beban Jasa	9.556.320.854,27	5.111.117.544,41
4	Beban Pemeliharaan	5.384.994.287,00	4.793.581.292,00
5	Beban Perjalanan Dinas	9.653.724.171,00	7.033.176.776,00
6	Beban Penyusutan & Amortisasi	5.485.125.296,55	4.832.694.855,19
7	Beban Lain-lain	5.113.712.636,00	4.708.603.073,00
	Jumlah	**71.700.552.579,82**	**65.794.620.528,60**

Realisasi masing-masing akun Beban dapat diuraikan sebagai berikut :

5.2.2.1 Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai-LO sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 32.640.475.375,00 atau sebesar 45,52% dari total beban sedangkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 34.248.419.713,00. Rincian realisasi Beban Pegawai-LO Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No	Beban Pegawai - LO	Tahun 2019	Tahun 2018
		Rp	Rp
1	Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO	7.447.522.100,00	8.099.663.700,00
2	Beban Tunjangan Keluarga - LO	649.856.352,00	720.319.752,00
3	Beban Tunjangan Jabatan - LO	236.500.000,00	302.370.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	52.315.000,00	361.350.000,00
5	Beban Tunjangan Beras - LO	320.115.000,00	397.006.440,00
6	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	342.691.440,00	21.857.140,00
7	Beban Pembulatan Gaji - LO	25.339.315,00	116.235,00
8	Beban Iuran BPJS Kesehatan - LO	111.656,00	227.319.746,00
9	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian - LO	207.924.314,00	71.562.897,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	15.296.553,00	2.614.299,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian - LO	45.889.626,00	7.842.896,00
12	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	11.837.364.019,00	13.271.156.608,00
13	Beban Honorarium PNS - LO	9.663.900.000,00	9.135.400.000,00
14	Beban Honorarium Non PNS - LO	1.795.650.000,00	1.629.840.000,00
	Jumlah	**32.640.475.375,00**	**34.248.419.713,00**

No	Beban Honorarium PNS - LO	Tahun 2019	Tahun 2018
		Rp	Rp
1	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	8.399.700.000,00	7.979.800.000,00
2	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa - LO	73.000.000,00	80.100.000,00
3	Beban Honorarium Pengelola Keuangan SKPD - LO	1.191.200.000,00	1.075.500.000,00
	Jumlah	**9.663.900.000,00**	**9.135.400.000,00**

No	Beban Honorarium Non PNS - LO	Tahun 2019	Tahun 2018
		Rp	Rp
1	Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - LO	1.185.850.000,00	997.800.000,00
2	Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan - LO	359.000.000,00	-
3	Beban Upah Tenaga Kerja - LO	24.500.000,00	114.000.000,00
4	Beban Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis - LO	216.300.000,00	518.040.000,00
5	Beban Upah Pekerja Seni	10.000.000,00	-
	Jumlah	**1.795.650.000,00**	**1.629.840.000,00**

5.2.2.2 Beban Persediaan - LO

Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.866.199.960,00 atau sebesar 5,39% dari total beban, sedangkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.067.027.275,00. Rincian beban Persediaan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	Beban Persediaan - LO	Tahun 2019	Tahun 2018
		Rp	Rp
1	Beban Habis Pakai	3.628.241.860,00	4.331.921.175,00
2	Beban Bahan Material	78.358.100,00	472.176.100,00
3	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	159.600.000,00	262.930.000,00
	Jumlah	**3.866.199.960,00**	**5.067.027.275,00**

5.2.2.3 Beban Jasa – LO

Beban Jasa sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 9.556.320.854,27,00 atau sebesar 13,33% dari total beban, sedangkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.111.117.544,41. Rincian beban Jasa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	Beban Jasa - LO	Tahun 2019	Tahun 2018
		Rp	Rp
1	Beban Jasa Kantor	4.683.301.455,00	3.616.108.223,00
2	Beban Premi Asuransi	307.788.899,27	156.636.321,41
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.670.700.000,00	157.500.000,00
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	-	5.200.000,00
5	Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	231.530.500,00	69.580.000,00
6	Beban Jasa Konsultansi	1.663.000.000,00	1.106.093.000,00
	Jumlah	**9.556.320.854,27**	**5.111.117.544,41**

5.2.2.4 Beban Pemeliharaan – LO

Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 5.384.994.287,00 atau sebesar 7,51% dari total beban, sedangkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 4.793.581.292,00. Rincian beban pemeliharaan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	Beban Pemeliharaan - LO	Tahun 2019	Tahun 2018
		Rp	Rp
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	336.987.404,00	339.518.603,00
2	Beban Pemeliharaan	5.048.006.883,00	4.454.062.689,00
	Jumlah	**5.384.994.287,00**	**4.793.581.292,00**

5.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas – LO

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 9.653.724.171,00 atau sebesar 13,46% dari total beban, sedangkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 7.033.176.776,00. Rincian beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	Beban Perjalanan Dinas - LO	Tahun 2019	Tahun 2018
		Rp	Rp
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.572.513.437,00	5.001.301.716,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.081.210.734,00	2.031.875.060,00
	Jumlah	**9.653.724.171,00**	**7.033.176.776,00**

5.2.2.6 Beban Penyusutan & Amortisasi – LO

Beban Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi Aset Tak Berwujud dan Beban Penyusutan Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 5.485.125.296,55 atau sebesar 7,65% dari total beban, sedangkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 4.832.694.855,19. Rincian beban penyusutan & amortisasi Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	Beban Penyusutan & Amortisasi- LO	Tahun 2019	Tahun 2018
		Rp	Rp
1	Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	3.632.609.589,31	3.087.417.719,03
2	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	1.734.034.901,52	1.712.531.996,11
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	12.425.140,21	12.425.140,05
4	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	20.000.000,00	20.000.000,00
5	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	86.055.665,51	320.000,00
	Jumlah	**5.485.125.296,55**	**4.832.694.855,19**

5.2.2.7 Beban Lain-lain – LO

Beban lain-lain sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.113.712.636,00 atau sebesar 7,13% dari total beban, sedangkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 4.708.603.073,00. Rincian beban lain-lain Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	Beban Lain-Lain- LO	Tahun 2019	Tahun 2018
		Rp	Rp
1	Beban Cetak dan Penggandaan	3.039.307.550,00	2.731.720.320,00
2	Beban Makanan dan Minuman	1.835.435.086,00	1.876.791.113,00
3	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns	238.970.000,00	42.375.000,00
4	Beban Penyisihan Piutang	-	12.816.640,00
5	Beban Lain-lain (Ekstrakomtabel , Penghapusan & Pelepasan Aset)	25.000,00	44.900.000,00
	Jumlah	**5.113.737.636,00**	**4.708.603.073,00**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pada Tahun Anggaran 2019 terjadi defisit sebesar Rp 115.125.000 yang merupakan kerugian dari Tuntutan Ganti Rugi.

5.2.3 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Lapporan Operasional per 31 Desember 2019 defisit sebesar Rp 63.294.406.536,82.

Uraian	31 December 2019	31 December 2018
	Rp	Rp
Pendapatan		
Pendapatan Asli Daerah	8.521.296.043,00	8.825.919.409,00
Pendapatan Transfer	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	**8.521.296.043,00**	**8.825.919.409,00**
Beban		
Beban Operasional		
Beban Pegawai	32.640.475.375,00	34.248.419.713,00
Beban Persediaan	3.866.199.960,00	5.067.027.275,00
Beban Jasa	9.556.320.854,27	5.111.117.544,41
Beban Pemeliharaan	5.384.994.287,00	4.793.581.292,00
Beban Perjalanan Dinas	9.653.724.171,00	7.033.176.776,00
Beban Penyusutan & Amortisasi	5.485.125.296,55	4.832.694.855,19
Beban Lain-lain	5.113.737.636,00	4.708.603.073,00
Jumlah Beban Operasional	**71.700.577.579,82**	**65.794.620.528,60**
Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional	**-63.179.281.536,82**	**-56.968.701.119,60**
Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional	(115.125.000,00)	0,00
Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/Defisit Laporan Operasional	**-63.294.406.536,82**	**-56.968.701.119,60**

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1 ASET

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	**Rp 0,00**	**Rp 0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sampai dengan

tanggal 31 Desember 2019 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00.

2. Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp 333.000,00	Rp 0,00

Kas di bendahara penerimaan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2019. Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 333.000,00 yang merupakan uang titipan untuk sewa ruangan untuk keperluan manasik pada bulan Januari 2020. Sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00.

3. Piutang Retribusi	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp 16.020.600,00	Rp 16.020.600,00

Piutang retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 16.020.800,00 yaitu berupa piutang retribusi sewa ruangan dan sewa penginapan di Asrama Haji Donohudan sejak tahun 2015. Sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 16.020.800,00.

4. Beban dibayar dimuka	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp 184.868.747,32	Rp 176.079.045,59

Beban dibayar dimuka merupakan uang yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang sampai tanggal neraca belum diterima prestasi kerja, yang berupa barang/jasa dari pihak ketiga yang bersangkutan. Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp 184.868.747,32 yaitu berupa asuransi dibayar dimuka untuk kendaraan dinas roda 2, kendaraan dinas roda 3, kendaraan dinas roda 4 dan asuransi dibayar dimuka untuk gedung dan bangunan. Sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 176.079.045,59.

5. Persediaan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp 58.693.000,00	Rp 40.735.000,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi

yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 58.693.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 40.735.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Persediaan Barang Habis Pakai	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp	Rp
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	58.438.000,00	39.094.500,00
2	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	1.641.000,00
	Jumlah	**58.693.000,00**	**40.735.500,00**

6. Aset Tetap

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp 138.327.100.381,94	**Rp 138.496.870.084,10**

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Rincian saldo aset tetap per 31 Desember 2019 dan saldo per 31 Desember 2018 adalah:

No	Aset Tetap	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp	Rp
1	Tanah	70.152.500.000,00	70.152.500.000,00
2	Peralatan dan Mesin	49.376.853.312,00	47.163.027.351,00
3	Gedung dan Bangunan	102.401.418.233,00	101.326.272.967,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	438.769.083,00	438.769.083,00
5	Aset Tetap Lainnya	180.125.180,00	181.096.162,00
6	Total Akumulasi Penyusutan	-84.222.565.426,06	(80.764.795.478,90)
	Jumlah	**138.327.100.381,94**	**138.496.870.084,10**

a. Tanah

Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2019 adalah Rp 70.152.500.000,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 70.152.500.000,00.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 8.673.594.720,09 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 8.147.304.879,40. Rincian Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp	Rp
1	Alat Besar	3.731.205.360,00	3.731.205.360,00
2	Alat Angkut	6.404.628.918,00	7.464.396.302,00
3	Alat Pertanian	28.280.000,00	28.280.000,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.747.344.737,00	26.867.899.642,00
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.685.378.709,00	2.574.128.709,00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	460.000,00	460.000,00
7	Komputer	8.779.555.588,00	6.496.657.338,00
	Total Aset - Peralatan & Mesin	**49.376.853.312,00**	**47.163.027.351,00**
	Total Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	-40.703.258.591,91	-39.015.722.471,60
	Nilai Aset - Peralatan & Mesin	**8.673.594.720,09**	**8.147.304.879,40**

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan dan Gedung per 31 Desember 2019 sebesar Rp 59.021.977.405,75 Sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 59.704.640.826,39. Rincian Gedung & Bangunan sebagai berikut :

No	Gedung & Bangunan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp	Rp
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	86.266.467.049,00	86.145.817.783,00
2	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	846.935.000,00	846.935.000,00
3	Tugu/Tanda batas	15.288.016.184,00	14.333.520.184,00
	Total Aset - Gedung & Bangunan	**102.401.418.233,00**	**101.326.272.967,00**
	Total Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan	-43.379.440.827,25	-41.621.632.140,61
	Nilai Aset - Gedung & Bangunan	**59.021.977.405,75**	**59.704.640.826,39**

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 298.903.076,10. Sedangkan saldo per 31 Desember 2018 Rp Rp 311.328.216,31. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

No	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp	Rp
1	Bangunan Air	10.150.000,00	10.150.000,00
2	Instalasi	416.219.083,00	416.219.083,00
3	Jaringan	12.400.000,00	12.400.000,00
	Total Aset - Jalan, Irigasi dan Jaringan	**438.769.083,00**	**438.769.083,00**
	Total Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-139.866.006,90	-127.440.866,69
	Nilai Aset - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**298.903.076,10**	**311.328.216,31**

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 180.150.180,00 yang Sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 181.096.162,00.

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp	Rp
1	Bahan Perpustakaan	85.887.890,00	86.748.872,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	94.237.290,00	94.347.290,00
	Total Aset Tetap Lainnya	**180.125.180,00**	**181.096.162,00**

7. Aset Lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp 2.112.717.228,93	**Rp 64.070.000,00**

No	Aset Lainnya	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp	Rp
1	Aset Tak Berwujud Lainnya	578.200.000,00	578.200.000,00
2	Aset Lain-Lain (Barang Rusak Berat)	8.496.844.542,00	2.768.657.216,00
	Total Aset Lainnya	**9.075.044.542,00**	**3.346.857.216,00**
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-538.200.000,00	-518.200.000,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-6.424.127.313,07	-2.764.587.216,00
	Total Akumulasi Amortisasi & Penyusutan	**-6.962.327.313,07**	**-3.282.787.216,00**
	Nilai Aset Lainnya	**2.112.717.228,93**	**64.070.000,00**

a. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset tak berwujud yaitu berupa software per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 40.000.000,00. Sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 60.000.000,00.

b. Aset Lain-Lain

No	Aset lain-Lain	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp	Rp
1	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	3.545.111.736,00	2.752.107.216,00
2	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	4.160.909.100,00	16.000.000,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	50.253.225,00	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	550.000,00	550.000,00
	Total Aset Lain- Lain Rusak Berat	**7.756.824.061,00**	**2.768.657.216,00**
5	Aset lain-lain Peralatan dan Mesin	740.020.481,00	0,00
	Total Aset Lain- Lain	**8.496.844.542,00**	**2.768.657.216,00**

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
8.	**Beban Penyisihan Piutang**	**Rp 16.020.800,00**	**Rp 16.020.800,00**

Beban Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 16.020.800,00 merupakan penyisihan piutang retribusi sewa ruangan dan sewa penginapan di Asrama Haji Donohudan yang tak tertagih selama empat tahun. Sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 16.020.800,00.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp 138.793.775.429,69 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2018.

2. Surplus/ Defisit - LO

Defisit - LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp 63.294.406.536,82 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

BAB 6
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6.1.1. KEDUDUKAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

6.1.2. TUGAS

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

6.1.3. FUNGSI

Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

6.1.4. VISI & MISI

Badan Pengelola Keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah yaitu :

VISI :

"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari"

"Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"

MISI :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

6.2 STRUKTUR ORGANISASI

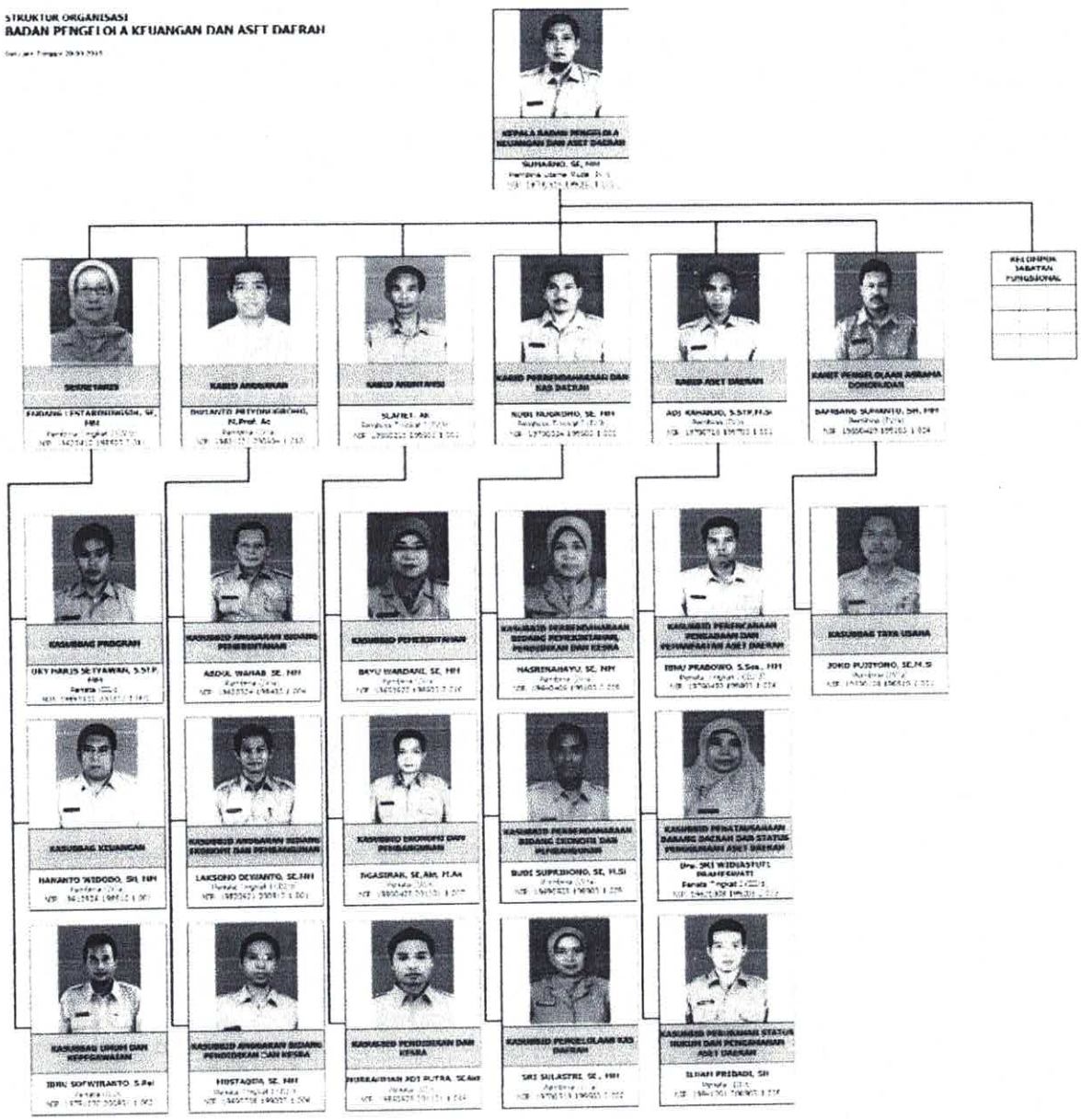

BAB 7
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan APBD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dan posisi keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusanlainnya.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah

Semarang, 31 Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Ka.Bid		
Kasubag		

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

LAMPIRAN

REKAPITULASI BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 040402
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tahun : 2019

No.	KODE AKUN	KODE OBJEK	KETERANGAN	JUMLAH	JUMLAH HARGA DLM RIBUAN (Rp.)	JUMLAH TOTAL	TOTAL HARGA DLM RIBUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.3.1		TANAH	-	-	7	70,152,500,000	
2		1.3.1.01	TANAH	7	70,152,500,000	-	-	
3	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	-	-	30,166	49,376,853,312	
4		1.3.2.01	ALAT BESAR	57	3,731,205,360	-	-	
5		1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	117	6,404,628,918	-	-	
6		1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	
7		1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	3	28,280,000	-	-	
8		1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	29,006	27,747,344,737	-	-	
9		1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	302	2,685,378,709	-	-	
10		1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	16	460,000	-	-	
11		1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	
12		1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	
13		1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	665	8,779,555,588	-	-	
14		1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	
15		1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	
16		1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	
17		1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	
18		1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	
19		1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	
20		1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	
21		1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-	-	-	-	
22		1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	
23	1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	84	102,401,418,233	
24		1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	42	86,266,467,049	-	-	
25		1.3.3.02	MONUMEN	1	846,935,000	-	-	
26		1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	
27		1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	41	15,288,016,184	-	-	
28	1.3.4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	24	438,769,083	
29		1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	
30		1.3.4.02	BANGUNAN AIR	1	10,150,000	-	-	
31		1.3.4.03	INSTALASI	6	416,219,083	-	-	
32		1.3.4.04	JARINGAN	17	12,400,000	-	-	
33	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	-	-	863	180,125,180	
34		1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	852	85,887,890	-	-	
35		1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	11	94,237,290	-	-	
36		1.3.5.03	HEWAN	-	-	-	-	
37		1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	
38		1.3.5.05	TANAMAN	-	-	-	-	
39		1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	
40		1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	
41	1.3.6		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	
42		1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN					
			JUMLAH	31,144	222,549,665,808	31,144	222,549,665,808	

Semarang, Desember 2019

Mengetahui,
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
NIP. 19700514 199202 1 001

Pengurus Barang

SUPARMANTO
NIP. 19770215 200801 1007

REKAP MUTASI ASET TETAP
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 040402
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tahun : 2019

No.	Objek	Keterangan	Saldo Awal		Penambahan		Pelepasan		Saldo Akhir	
			Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.3.1.01	TANAH	7	70,152,500,000	-	-	-	-	7	70,152,500,000
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	57	3,731,205,360	-	-	-	-	57	3,731,205,360
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	127	7,464,396,302	2	374,050,000	12	1,433,817,384	117	6,404,628,918
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	3	28,280,000	-	-	-	-	3	28,280,000
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	28,669	26,867,899,642	575	1,735,870,200	238	856,425,105	29,006	27,747,344,737
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	299	2,574,128,709	22	399,508,500	19	288,258,500	302	2,685,378,709
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	16	460,000	-	-	-	-	16	460,000
9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	600	6,496,657,338	137	2,750,151,000	72	467,252,750	665	8,779,555,588
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	1	25,000	1	25,000	-	-
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	42	86,145,817,783	2	4,392,142,100	2	4,271,492,834	42	86,266,467,049
22	1.3.3.02	MONUMEN	1	846,935,000	-	-	-	-	1	846,935,000
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	36	14,333,520,184	5	954,496,000	-	-	41	15,288,016,184
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	1	10,150,000	-	-	-	-	1	10,150,000
27	1.3.4.03	INSTALASI	6	416,219,083	1	50,253,225	1	50,253,225	6	416,219,083
28	1.3.4.04	JARINGAN	17	12,400,000	-	-	-	-	17	12,400,000
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	1,700	86,748,872	-	-	848	860,982	852	85,887,890
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	16	94,347,290	-	-	5	110,000	11	94,237,290
31	1.3.5.03	HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
			31,597	219,261,665,563	745	10,656,496,025	1,198	7,368,495,780	31,144	222,549,665,808

Semarang, Desember 2019

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
NIP. 19700514 199202 1 001

Pengurus Barang

SUPARMANTO
NIP. 19770215 200801 1007

MUTASI ASET TETAP PEMERINTAH PR
AUDITED 2019

Kode Lokasi : 040402
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.		Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2018		PENAMBAHAN												
													REKLASIFIKASI				
			Jml.	Harga	Jml.	Belanja Modal	Jml.	Belanja Barang Jasa	Jml.	Hibah	Jml.	Mutasi Masuk	Jml.	Dari Aset Tetap	Jml.	Dari Aset Lainnya	Jml.
					BMD		NBM		HBH		MMK		RKM		ASL		IN
1		2	3		4		5		8		9		10		11		
1	1.3.1.01	TANAH	7	70,152,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	57	3,731,205,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	127	7,464,396,302	1	197,000,000	-	-	-	-	1	177,050,000	-	-	-	-	-
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	3	28,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	28,669	26,867,899,642	532	1,501,488,700	-	-	-	-	18	134,381,500	25	100,000,000	-	-	-
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	299	2,574,128,709	7	135,740,000	-	-	-	-	15	263,768,500	-	-	-	-	-
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	16	460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	600	6,496,657,338	100	2,446,781,000	-	-	-	-	34	297,070,000	3	6,300,000	-	-	-
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,000	-	-	-
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,392,142,100	-	-	-	-	-
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	42	86,145,817,783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.3.3.02	MONUMEN	1	846,935,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	36	14,333,520,184	5	954,496,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	1	10,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.3.4.03	INSTALASI	6	416,219,083	-	-	-	-	-	-	1	50,253,225	-	-	-	-	-
28	1.3.4.04	JARINGAN	17	12,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	1,700	86,748,872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	16	94,347,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1.3.5.03	HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			31,597	219,261,665,563	645	5,235,505,700	-	-	-	-	71	5,314,665,325	29	106,325,000	-	-	-

			PELEPASAN												SALDO AKHIR TAHUN 2019	
							REKLASIFIKASI									
Koreksi	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	EKTRA KOMP.	JmL	Mutasi Keluar	Jml.	Ke Aset Tetap	Jml.	Ke Aset Lainnya	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Pelepasan	Jml.	Harga
NV/NLK			KAD		MKL		RKL		KIBL		KOR/NLK					
12	13		14		15		16		17		18		19		20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	70,152,500,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	3,731,205,360
-	2	374,050,000	-	-	5	406,909,988	-	-	7	1,026,907,396	-	-	12	1,433,817,384	117	6,404,628,918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28,280,000
-	575	1,735,870,200	-	-	33	185,680,250	3	6,300,000	202	664,444,855	-	-	238	856,425,105	29,006	27,747,344,737
-	22	399,508,500	-	-	15	263,768,500	-	-	4	24,490,000	-	-	19	288,258,500	302	2,685,378,709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	460,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	137	2,750,151,000	-	-	33	243,070,000	25	100,000,000	14	124,182,750	-	-	72	467,252,750	665	8,779,555,588
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	25,000	1	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,000	-	-
-	2	4,392,142,100	-	-	1	126,583,734	-	-	1	4,144,909,100	-	-	2	4,271,492,834	42	86,266,467,049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	846,935,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	15,288,016,184
-	5	954,496,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,150,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	416,219,083
-	1	50,253,225	-	-	-	-	-	-	1	50,253,225	-	-	1	50,253,225	17	12,400,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852	85,887,890
-	-	-	-	-	848	860,982	-	-	-	-	-	-	848	860,982	11	94,237,290
-	-	-	-	-	4	85,000	1	25,000	-	-	-	-	5	110,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	745	10,656,496,025	1	25,000	939	1,226,958,454	29	106,325,000	229	6,035,187,326	-	-	1,198	7,368,495,780	31,144	222,549,665,808

REKAP MUTASI ASET TAK BERWUJUD
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 040402
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tahun : 2019

No.	Objek	Keterangan	Saldo Awal		Penambahan		Pelepasan		Saldo Akhir	
			Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.5.3.01.01.01	GOODWILL	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.5.3.01.01.02	LISENSI DAN FRENCHISE	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.5.3.01.01.03	HAK CIPTA	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.5.3.01.01.04	HAK PATEN	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.5.3.01.01.05	SOFTWARE	3	578,200,000	-	-	-	-	3	578,200,000
6	1.5.3.01.01.06	KAJIAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.5.3.01.01.07	ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/ BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.5.3.01.01.08	ASET TIDAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.5.3.01.01.09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	578,200,000	-	-	-	-	3	578,200,000

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
NIP. 19700524 199202 1 001

Semarang, Desember 2019

Penguasa Barang

SUPARMANTO
NIP. 19770215 200801 1007

REKAP MUTASI ASET LAINNYA
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 040402
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tahun : 2019

No.	Objek	Keterangan	Saldo Awal		Penambahan		Penghapusan		Saldo Akhir	
			Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.5.4.01.01.01.001	Tanah Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.5.4.01.01.01.002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	4,116	2,752,107,216	175	793,004,520	-	-	4,291	3,545,111,736
3	1.5.4.01.01.01.003	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	1	16,000,000	1	4,144,909,100	-	-	2	4,160,909,100
4	1.5.4.01.01.01.004	Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	-	-	1	50,253,225	-	-	1	50,253,225
5	1.5.4.01.01.01.005	Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	8	550,000	-	-	-	-	8	550,000
6	1.5.4.01.01.02.001	Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.5.4.01.01.02.002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.5.4.01.01.02.003	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.5.4.01.01.02.004	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.5.4.01.01.02.005	Aset Tetap Lainnya Yang Tidak Digunakan Dalam	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.5.4.01.01.03.001	Aset Lain-lain Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.5.4.01.01.03.002	Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin	-	-	52	1,047,020,481	1	307,000,000	51	740,020,481
13	1.5.4.01.01.03.003	Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.5.4.01.01.03.004	Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.5.4.01.01.03.005	Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
			4,125	2,768,657,216	229	6,035,187,326	1	307,000,000	4,353	8,496,844,542

Semarang, Desember 2019

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
NIP. 19700514 199202 1 001

Pengurus Barang

SUPARMANTO
NIP. 19770215 200801 1007

JURNAL MUTASI ASET LAINNYA 2019
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 040402
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Akun	Keterangan	SALDO AWAL 2018		Penambahan							
					Reklas Aset tetap		Koreksi/Temuan		Jumlah Tambah		Reklas /	
			Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	
					ASL		SAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1.5.4.01.01.01.001	Tanah Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1.5.4.01.01.01.002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	4,116	2,752,107,216	175	793,004,520	-	-	175	793,004,520	-	
3	1.5.4.01.01.01.003	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	1	16,000,000	1	4,144,909,100	-	-	1	4,144,909,100	-	
4	1.5.4.01.01.01.004	Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	-	-	1	50,253,225	-	-	1	50,253,225	-	
5	1.5.4.01.01.01.005	Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	8	550,000	-	-	-	-	-	-	-	
6	1.5.4.01.01.02.001	Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	1.5.4.01.01.02.002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	1.5.4.01.01.02.003	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	1.5.4.01.01.02.004	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	1.5.4.01.01.02.005	Aset Tetap Lainnya Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	1.5.4.01.01.03.001	Aset Lain-lain Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	1.5.4.01.01.03.002	Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin	-	-	52	1,047,020,481	-	-	52	1,047,020,481	-	
13	1.5.4.01.01.03.003	Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	1.5.4.01.01.03.004	Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1.5.4.01.01.03.005	Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4,125	2,768,657,216	229	6,035,187,326	-	-	229	6,035,187,326	-	

Pelepasan			Penghapusan								Jumlah Kurang		SALDO AKHIR 2019	
Aset Tetap	Pemanfaatan		Penjualan		Tuntutan Ganti Rugi		Lain-Lain		Koreksi					
Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga
AST	MFT		PJL		TGR		HBH,TKM,MDL,MSN		KOR					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,291	3,545,111,736
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,160,909,100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,253,225
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	550,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	307,000,000	-	-	-	-	1	307,000,000	51	740,020,481
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	307,000,000	-	-	-	-	1	307,000,000	4,353	8,496,844,542

REKAP MUTASI ASET EKTRAOMPTABLE
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 040402
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tahur : 2019

No.	Objek	Keterangan	Saldo Awal		Penambahan		Pelepasan		Saldo Akhir	
			Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.3.2.01	ALAT BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3,078	978,268,500	-	-	-	-	3,078	978,268,500
6	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	7	2,100,000	-	-	-	-	7	2,100,000
7	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	1	25,000	-	-	1	25,000
20	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.3.3.02	MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	15	44,900,000	-	-	-	-	15	44,900,000
24	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.3.4.03	INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.3.4.04	JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.3.5.02	BARANG PERCORAK	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1.3.5.03	HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.3.5.05	TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,100	1,025,268,500	1	25,000	-	-	3,101	1,025,293,500

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
NIP. 19700514 199202 1 001

Semarang, Desember 2019

Pengurus Barang

SUPARMANTO
NIP. 19770215 200801 1007

MUTASI ASET EKTRAKOMPTABEL PEMERINTAH PROVINSI J
AUDITED 2019

Kode Lokasi : 040402
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.		Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2018		Jml.	Belanja Barang Jasa	Jml.	Hibah	Jml.	Mutasi Masuk	Reklasifikasi				Jml.	Koreksi	Jml.
			Jml.	Harga							Jml	dari Aset Ektrakomp	Jml	dari Aset Tetap			
					NBM		HBH		MMK		RKM		ASTM		INV/NLK		
1		2	3		4		5		6		7		8		9		
1	1.3.2.01	ALAT BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3,078	978,268,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	7	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,000	-	-	1
19	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.3.3.02	MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	15	44,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.3.4.03	INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.3.4.04	JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1.3.5.03	HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.3.5.05	TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,100	1,025,268,500	-	-	-	-	-	-					-	-	1

Jumlah Tambah	PELEPASAN												SALDO AKHIR TAHUN	
	Jml.	Mutasi Keluar	Jml	Usulan Penghapusan	REKLASIFIKASI				Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Pelepasan	Jml.	Harga
					Jml.	ke Aset Ektrakomp	Jml.	ke Aset Tetap						
	MKL		KIBL		RKL		ASTK		KOR/NLK					
10	11		12		13		14		15		16		17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,078	978,268,500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2,100,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,000
25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	44,900,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	3,101	1,025,293,500

REKAP MUTASI ASET PEMANFAATAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 040402
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tahun : 2019

No.	Objek	Keterangan	Saldo Awal		Penambahan		Penghapusan		Saldo Akhir	
			Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.5.2.01.01.01.001	Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.5.2.01.01.01.002	Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.5.2.01.01.01.003	Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.5.2.01.01.01.004	Sewa Jalam, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.5.2.01.01.02.001	Kerja Sama Pemanfaatan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.5.2.01.01.02.002	Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.5.2.01.01.02.003	Kerja Sama Pemanfaatan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.5.2.01.01.02.004	Kerja Sama Pemanfaatan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.5.2.01.01.02.005	Kerja Sama Pemanfaatan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.5.2.01.01.03.001	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.5.2.01.01.03.002	Bangun Serah Guna (BSG) Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.5.2.01.01.03.003	Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.5.2.01.01.03.004	Bangun Serah Guna (BSG) Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.5.2.01.01.03.005	Bangun Serah Guna (BSG) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.5.2.01.01.04.001	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.5.2.01.01.04.002	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.5.2.01.01.04.003	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Bangunan dan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.5.2.01.01.04.004	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.5.2.01.01.04.005	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1.5.2.01.01.05.001	Pinjam Pakai Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.5.2.01.01.05.002	Pinjam Pakai Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.5.2.01.01.05.003	Pinjam Pakai Bangunan dan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.5.2.01.01.05.004	Pinjam Pakai Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.5.2.01.01.05.005	Pinjam Pakai Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

Semarang, Desember 2019

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
NIP. 19700514 199202 1 001

Pengurus Barang

SUPARMANTO
NIP. 19770215 200801 1007

AKUMULASI PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun : 2019

Kode Lokasi : 040402
Keterangan : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.		Uraian	Jumlah	Nilai Akhir Per 31 Desember 2019	Akumulasi Awal	Mutasi									Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Per 31 Desember 2019
						Masuk					Keluar						
						Hibah	Mutasi Masuk	Reklas Masuk	Aset Lainnya	Koreksi Tambah	Ekstrakontabel	Mutasi Keluar	Reklas Keluar	Aset Lainnya	Koreksi Kurang			
1	1.3.7.01.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR	57	3,731,205,360.00	2,044,383,735.00	-	-	-	-	-	-	362,647,488.00	-	-	-	268,121,625.01	2,312,505,360.01	1,418,699,999.99
2	1.3.7.01.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN	117	6,404,628,918.00	5,232,278,817.00	-	132,787,500.00	-	-	-	-	-	-	901,747,126.00	-	609,268,572.50	4,709,940,275.50	1,694,688,642.50
3	1.3.7.01.03	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.3.7.01.04	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERTANIAN	3	28,280,000.00	28,280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,280,000.00	-
5	1.3.7.01.05	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	29,006	27,747,344,737.00	23,922,779,009.60	-	67,268,500.00	-	-	-	-	121,617,250.00	-	664,444,855.00	-	1,621,300,060.80	24,825,285,465.40	2,922,059,271.60
6	1.3.7.01.06	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	302	2,685,378,709.00	2,082,338,197.00	-	178,487,300.00	-	-	-	-	178,487,300.00	-	24,490,000.00	-	191,705,456.00	2,249,553,653.00	435,825,056.00
7	1.3.7.01.07	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	16	460,000.00	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,000.00	-
8	1.3.7.01.08	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.3.7.01.09	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.3.7.01.10	AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER	665	8,779,555,588.00	5,705,202,713.00	-	274,632,500.00	-	-	-	-	220,632,500.00	-	124,182,750.00	-	942,213,875.00	6,577,233,838.00	2,202,321,750.00
11	1.3.7.01.11	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.3.7.01.12	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.3.7.01.13	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.3.7.01.14	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.3.7.01.15	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.3.7.01.16	AKUMULASI PENYUSUTAN PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.3.7.01.17	AKUMULASI PENYUSUTAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.3.7.01.18	AKUMULASI PENYUSUTAN RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.3.7.01.19	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN OLAH RAGA	42	86,266,467,049.00	40,011,158,938.31	-	2,099,699,313.06	25,000.00	-	-	25,000.00	40,506,794.68	-	2,035,418,733.06	-	1,411,335,877.84	41,446,268,601.27	44,820,198,447.73
20	1.3.7.02.01	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG	1	846,935,000.00	67,754,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,938,700.00	84,693,500.00	762,241,500.00
21	1.3.7.02.02	AKUMULASI PENYUSUTAN MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.3.7.02.03	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN MENARA	41	15,288,016,184.00	1,542,718,402.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305,760,323.68	1,848,478,725.98	13,439,537,458.02
23	1.3.7.02.04	AKUMULASI PENYUSUTAN TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.3.7.03.01	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	1	10,150,000.00	2,030,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,750.00	2,283,750.00	7,866,250.00
25	1.3.7.03.02	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR	6	416,219,083.00	122,104,200.08	-	15,075,967.50	-	-	-	-	-	-	15,075,967.50	-	11,758,056.82	133,862,256.90	282,356,826.10
26	1.3.7.03.03	AKUMULASI PENYUSUTAN AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI	17	12,400,000.00	3,306,666.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413,333.39	3,720,000.00	8,680,000.00
27	1.3.7.03.04	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1.3.7.04.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA																
		Jumlah	30,274	152,217,040,628.00	80,764,795,478.90	-	2,767,951,080.56		-	-	25,000.00	923,891,332.88		3,785,359,431.56	-	5,379,069,631.04	84,222,565,426.06	67,994,475,201.94

AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun : 2019

Kode Lokasi : 040402
Keterangan : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.		Uraian	Jumlah	Nilai Akhir Per 31 Desember 2019	Akumulasi Awal	Mutasi								Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Per 31 Desember 2019
						Masuk				Keluar						
						Hibah	Mutasi Masuk	Aset Lainnya	Koreksi Tambah	Ekstrakontabel	Mutasi Keluar	Aset Lainnya	Koreksi Kurang			
1	1.5.5.01.01.01.00	Akumulasi Amortisasi Goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.5.5.01.01.01.00	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Frenchise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.5.5.01.01.01.00	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.5.5.01.01.01.00	Akumulasi Amortisasi Hak Paten	3	578,200,000.00	518,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	538,200,000.00	40,000,000.00
5	1.5.5.01.01.01.00	Akumulasi Amortisasi Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.5.5.01.01.01.00	Akumulasi Amortisasi Kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.5.5.01.01.01.00	Akumulasi Amortisasi Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.5.5.01.01.01.00	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	3	578,200,000.00	518,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	538,200,000.00	40,000,000.00

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun : 2019

Kode Lokasi : 040402
Keterangan : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.		Uraian	Jumlah	Nilai Akhir Per 31 Desember 2019	Akumulasi Awal	Mutasi									Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Per 31 Desember 2019
						Masuk			Keluar								
						Aset tetap	Reklas Aset Lain	Koreksi Tambah	Aset Tetap	Reklas Pemanfa	Penjualan	Ganti Rugi	LAIN2	Koreksi			
1	1.5.6.01.01.01.00	Akumulasi Penyusutan Sewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.5.6.01.01.01.00	Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Pemanfaatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.5.6.01.01.01.00	Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BSG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.5.6.01.01.01.00	Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.5.6.01.01.01.00	Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai	4,302	7,756,824,061.00	2,764,587,216.00	2,843,499,220.56	-	-	-	-	-	-	-	-	82,710,575.51	5,690,797,012.07	2,066,027,048.93
6	1.5.6.01.02.00	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.5.6.01.01.02.00	Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	51	740,020,481.00	-	921,860,211.00	-	-	-	-	-	191,875,000.00	-	-	3,345,090.00	733,330,301.00	6,690,180.00
8	1.5.6.01.01.02.00	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya															
		Jumlah	4,353	8,496,844,542.00	2,764,587,216.00	3,765,359,431.56	-	-	-	-	-	191,875,000.00	-	-	86,055,665.51	6,424,127,313.07	2,072,717,228.93

Semarang, Desember 2019

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
NIP. 19700514 199202 1 001

Pengurus Barang

SUPARMANTO
NIP. 19770215 200801 1007

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Taman Menteri Supeno Nomor 2 Semarang Kode Pos 50243 Telp. 024-8311174
Fax. 024-8311172 laman http://www.bpkad.jatengprov.go.id
Surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN STOCK OPNAME
Nomor : 036/ /BPKAD/XII/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu Sembilan belas (31-12-2019), bertempat di Gudang Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Nurul Kusumayani, SH
Nip : 19780131 201001 2 003
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu
Instansi : BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Telah melakukan stock opname terhadap barang persediaan yang disimpan dalam Gudang kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Jl. Taman Menteri Supeno No. 2 Semarang, dengan perincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Stock Opname ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
NIP. 19700514 199202 1 001

PENGURUS BARANG PEMBANTU

AYU NURUL KUSUMAYANI, SH
NIP. 19780131 201001 2 003

LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD : BPKAD
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH
OBYEK : Barang Pakai Habis

NO	KODE	NAMA BARANG	SATUAN	VOL	SALDO AWAL 1 JANUARI 2019	MUTASI 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019				VOL	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2019
						VOL	TAMBAH	VOL	KURANG		
		ATK									
1		Amplop putih panjang	pak	3	61,500	200	3,200,000	173	2,781,500	30	480,000
2		Amplop surat kop dinas besar	pak	7	371,000	200	9,983,000	194	9,704,000	13	650,000
3		*Ballpoint biasa*	buah	5	100,000			5	100,000	-	-
4		Ballpoint pentel	bh	-	-	120	2,400,000	117	2,340,000	3	60,000
5		Bolliner	bh	1	42,000	150	6,300,000	146	6,132,000	5	210,000
6		Batu baterai AA	bh	5	65,000	100	1,300,000	90	1,170,000	15	195,000
7		Batu baterai kotak 9 V	bh	4	384,000	100	9,600,000	99	9,504,000	5	480,000
8		Batu baterai AAA	bh	3	36,000	120	1,440,000	108	1,296,000	15	180,000
9		Bantalan Stempel	bh	2	200,000	20	2,000,000	17	1,700,000	5	500,000
10		Binder Clips19	dos	6	276,000	120	5,520,000	121	5,566,000	5	230,000
11		Binder Clips25	dos	4	236,000	120	7,080,000	116	6,844,000	8	472,000
12		Binder Clips32	dos	6	288,000	120	5,760,000	109	5,232,000	17	816,000
13		Binder Clips51	dos	4	196,000	120	5,880,000	99	4,851,000	25	1,225,000
14		Buku folio isi 100	bh	-	-	60	3,300,000	57	3,135,000	3	165,000
15		Buku kwarto isi 100	bh	2	60,000	60	1,800,000	57	1,710,000	5	150,000
16		Buku Kwitansi	buah	2	104,000	120	6,240,000	117	6,084,000	5	260,000
17		Cutter besar	buah	2	82,000	50	2,050,000	47	1,927,000	5	205,000
18		Cutter kecil	bh	-	-	50	950,000	50	950,000	-	-
19		Isi Cutter besar	Doos	-	-	70	1,680,000	65	1,560,000	5	120,000
20		Isi Cutter kecil	doos	4	56,000	70	980,000	74	1,036,000	-	-
21		Isi pentel	bh	-	-	54	2,376,000	54	2,376,000	-	-
22		Isi Staples10	pak	4	100,000	100	2,500,000	87	2,175,000	17	425,000
23		Isi Staples369	pak	10	260,000	100	2,600,000	97	2,522,000	13	338,000
24		Isolasi Panfik	rol	6	204,000	71	2,414,000	74	2,516,000	3	102,000
25		Lakban 2" hitam	rol	2	24,000	71	852,000	67	804,000	6	72,000
26		*Lem kental*	bh	5	100,000			5	100,000	-	-
27		Lem Stik/Glue Stik	buah	2	118,000	100	5,900,000	89	5,723,000	13	295,000
28		Odner plastik logam	bh	-	-	100	5,300,000	86	4,558,000	14	742,000
29		Paper Clips	doos	-	-	288	5,305,500	273	5,020,500	15	285,000
30		Paper Clips Besar	dos	10	440,000	100	4,400,000	92	4,048,000	18	792,000
31		Penggaris mika 50 cm	bh	-	-	50	700,000	46	644,000	4	56,000
32		Penggaris besi 100 cm	bh	1	44,000	50	2,200,000	49	2,156,000	2	88,000
33		*Penghapus papan tulis*	bh	4	52,000			4	52,000	-	-
34		*Penghapus Cair/Fluid*	buah	3	282,000			3	282,000	-	-
35		Pensil 2 B	buah	10	160,000	100	1,600,000	98	1,568,000	12	192,000
36		Pentel	bh	-	-	40	3,960,000	40	3,960,000	-	-
37		*Perporator kecil*	bh	3	225,000			3	225,000	-	-
38		Perporator besar	bh	1	235,000	10	2,350,000	9	2,115,000	2	470,000
39		*Plastik Mika*	pak	2	96,000			2	96,000	-	-
40		Tali rapia besar	rol	3	237,000	20	1,580,000	18	1,422,000	5	395,000
41		*Serutan pencil*	bh	1	177,000			1	177,000	-	-
42		Penghapus /Stip	bh	2	18,000	25	225,000	24	216,000	3	27,000
43		Spidol permanent	lusin	5	1,065,000	13	2,769,000	15	3,195,000	3	639,000
44		Stabillo	Doos	-	-	10	2,590,000	5	1,295,000	5	1,295,000
45		Stick Notes	pak	3	63,000	150	3,150,000	133	2,793,000	20	420,000
46		*Stempel*	bh	15	2,745,000			15	2,745,000	-	-
47		*Stamp Date 12 digit*	bh	5	1,095,000			5	1,095,000	-	-
48		Steples no. 10	bh	2	38,000	19	361,000	18	342,000	3	57,000
49		Steples no. 369	bh	3	201,000	20	1,340,000	19	1,273,000	4	268,000
50		Stopmap	buah	10	50,000	1,211	6,389,000	1,191	6,259,000	30	180,000
51		*Stopmap / Snelechter*	buah	100	600,000			100	600,000	-	-
52		Flash Disk	Pcs	-	-	70	7,000,000	55		15	1,500,000
53		Tinta Stempel	botol	8	200,000	30	750,000	14	350,000	24	600,000
54		Gunting	bh	-	-	20	500,000	13	325,000	7	175,000
55		*Kertas Buffalo/Manila*	lembar	13	39,000			13	39,000	-	-
56		Kertas Faximile	rol	20	720,000	300	9,000,000	296	9,000,000	24	720,000
57		*Kertas folio bergaris*	pak	7	476,000			7	476,000	-	-
58		Kertas Foto	pak	2	130,000	20	1,300,000	19	1,235,000	3	195,000
59		Kertas HVS A4 70	rim	18	828,000	80	3,920,000	81	3,915,000	17	833,000